



PERAN PEREMPUAN DALAM PENCAPAIAN SDGS MELALUI PEMBANGUNAN NASIONAL

Indriastuti¹, Dwi Hardaningtyas², Novita Maulida Ikmal³

Universitas Wijaya Putra Surabaya^{1,2,3}

indriastuti@uwp.ac.id¹

Artikel info:

Submitted: 01-02-2023; Review: 05-12-2023; Accepted:08-12-2023

Abstract

This research aims to describe the role of women in achieving the SDGs through national development. In the current era, there are many women's groups that can take action in public spaces. The method used in this research is a literature study by looking at various data and documents related to the role of women from various sources. The results of this research show that the main role of women in development is in the fields of education, health, labor force participation, and issues of violence. In the field of education, women's educational status reached 23.03% in rural areas and 24.14% in urban areas. In the health sector, 64.1% of women have health insurance and 66.78% of women have main jobs in the agriculture, forestry and fisheries, wholesale trade, and processing industry sectors. The goal of the SDGs is to end poverty, reduce inequality and protect the environment. In the SDGs, it can be estimated that more than 600 million new jobs need to be created by 2030. The main principle of the SDGs is to leave no one behind or no one left behind.

Keywords: *Women; National Development; SDGs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran perempuan dalam pencapaian tuntutan SDGs melalui pembangunan nasional. Di era saat ini sudah banyak kelompok perempuan yang mampu action di ruang publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan melihat berbagai data dan dokumen terkait peran perempuan dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan yang utama yaitu pada bidang Pendidikan, kesehatan, partisipasi Angkatan kerja, dan isu kekerasan. Dalam bidang Pendidikan status Pendidikan perempuan mencapai 23,03% di pedesaan dan 24,14% di perkotaan. Pada bidang kesehatan mencapai 64,1% perempuan yang memiliki jaminan kesehatan dan 66,78% perempuan memiliki lapangan pekerjaan utama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan industri pengolahan. Tujuan daripada SDGs yakni mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Dalam SDGs dapat diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Pada dasarnya prinsip utama SDGs yaitu tidak meninggalkan siapapun atau *no one left behind*.

Kata Kunci: *Perempuan; Pembangunan Nasional; SDGs*

PENDAHULUAN

Perbincangan sosial terkait gender dan pembangunan saat ini masih dalam perpincangan publik. Khususnya terkait tentang keberadaan perempuan yang tidak bisa lepas dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan pandangan sejarah perempuan memainkan banyak peran yakni peran sebagai ibu, istri, petani, pekerja sosial dll. Lebih dari itu peran perempuan di Indonesia pada umumnya berperan dalam berbagai bidang (Manembu, 2017).

Pada era emansipasi, perempuan juga sering dianggap sebagai kelompok kelas subordinat sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan persamaan hak. Perempuan dianggap hanya mampu bekerja dalam urusan domestik, sehingga tidak banyak masyarakat percaya akan kemampuan perempuan di ruang publik. Khususnya pada masyarakat yang masih memiliki mind set tradisional atau masyarakat yang masih tinggal di pedesaan (Ikmal et al., 2022).

World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (Mason & King, 2001). Menurut (Gomes et al., 2023) mempromosikan kesetaraan gender dan penyetaraan ekonomi secara berkelanjutan bukan hanya melalui kebijakan, ekonomi dan politik, akan tetapi juga melalui etika.

Seiring berjalannya waktu sepak terjang perempuan di ruang publik mampu mengubah pandangan sebagai kelompok subordinat pada perempuan. Perempuan mampu membuktikan kepada publik bahwa mampu untuk menjalankan peran ganda. Tidak sedikit perempuan yang saat ini sukses dalam karirnya dan juga sukses menjadi ibu rumah tangga. (Kusnadi, 2003) mengemukakan bahwa besarnya peran perempuan pesisir membuat pentingnya dilakukan pemetaan kedudukan dan peran perempuan pesisir dalam rangka mendukung upaya-upaya pembangunan optimalisasi peran perempuan pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah pesisir, khususnya pada masyarakat nelayan. menurut (Kusnadi, 2003), keterlibatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi tidak terlepas dari sistem pembagian kerja di dalam keluarga. Peran perempuan ini tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi tetapi juga kepuasan batin, kehormatan dan kebanggaan sosial.

Dalam manajemen keluarga, pembagian tugas dan tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan jenis kelamin (Murniati, 2004), walaupun dalam konteks masyarakat global saat ini pembagian tugas dan tanggung jawab sudah seharusnya bersifat terbuka dengan tidak lagi membatasi ruang gerak, baik laki-laki maupun perempuan. (Kusnadi, 2001) menyebutkan bahwa makin menguatnya kedudukan perempuan dalam aktivitas ekonomi terjadi sebagai reaksi terhadap kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan modernisasi perikanan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya. Kemiskinan mendorong kaum perempuan untuk berusaha dan bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Kusnadi, 2001).

Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 lalu, populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa atau 50,2% adalah laki-laki sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8% adalah perempuan. Sedangkan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia diketahui mengalami kenaikan dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG yang mendekati 100 itu secara jelas mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia ikuttercatat naik dari 71,39 pada 2016 menjadi 71,74 di 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Satu hal yang perlu digaris bawahi, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih tinggi dari laki-laki. Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan justru sebaliknya lebih rendah dibanding TPAK laki-laki yakni hanya di angka 55%. Data BPS, sekitar 26% pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga, selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah yang proporsinya mencapai 89% atau sekitar 43,8 juta jiwa.

Beberapa permasalahan yang muncul misalnya dalam pelaksanaan otonomi daerah, peraturan daerah yang berkaitan dengan perempuan muncul tanpa komunikasi dengan perempuan itu sendiri dan berdampak negatif bagi perempuan (Probosiwi, 2015). Selain itu, dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit.

Dalam kehidupan sosial masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai kelompok kelas dua, bahkan di lingkungan keluarga. Anak laki-laki lebih diberi kesempatan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan dibandingkan anak perempuan. Faktor sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga sering berakibat pada rendahnya kinerja akademik bahkan putus sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang relevan dengan tulisan ini yakni artikel (Probosiwi, 2015) yang berjudul *Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and its role on social welfare development)*, dalam artikelnya menjelaskan bahwa Kelompok Usaha Bersama (Kube) atau jaminan kesejahteraan sosial berbasis gender dapat menjadi alternatif penyeteraan gender terutama sektor ekonomi, sehingga mampu meningkatkan posisi tawar perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam wilayah pesisir, perempuan juga memiliki peran yang mendukung seperti halnya penelitian (Nurlaili & Muhartono, 2017) tentang *Peran Perempuan Nelayan dalam Usaha Perikanan Tangkap dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta*. Perempuan pesisir memiliki peran dalam aktivitas usaha perikanan mulai dari mempersiapkan perbekalan melaut dan membantu perbaikan jaring. Tidak hanya itu pasca melaut tugas perempuan adalah memilah hasil tangkapan ikan dan memasarkannya.

Tujuan pemberdayaan perempuan dalam SDGs yaitu mengupayakan perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi. Peran serta perempuan dalam pembangunan sangat penting dalam menentukan berhasilnya pembangunan. Hal tersebut ditekankan dalam artikel (Alfirdaus, 2019) terkait pentingnya penajaman perspektif gender di dalam pembangunan guna mencapai target SDGs. Argumennya mengatakan bahwa penajaman perspektif tersebut dapat dilakukan dengan menguatkan strategi pemberdayaan kaum perempuan melalui pelibatan stakeholder secara lebih ekstensif

dan intensif.

Dalam kehidupan perekonomian, peran perempuan yaitu sebagai manager keuangan. Menurut (Khairunnisa et al., 2022), penyebab utama partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif belum maksimal adalah konstruksi sosial gender. Serta belum terpenuhinya kebutuhan praktis dan kepentingan strategis perempuan dalam ruang publik. Masyarakat seringkali menganggap rendah perempuan yang bekerja, khususnya perempuan yang bekerja sebagai gojek, supir taxi, atau tukang parkir. Berdasarkan penelitian terdahulu penelitian ini membahas terkait sejauh mana peran perempuan dalam pencapaian SDGs melalui Pembangunan Nasional.

Teori Peran

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Peran Perempuan dalam Pembangunan

Menurut Hubies dalam (Aulia, 2018), beliau mengatakan bahwa analisis alternatif mengenai peran wanita dapat dilihat dari tiga perspektif dalam kaitanya dengan posisinya sebagai manager rumah tangga dan partisipan pembangunan atau pekerja pencari nafkah, jika dilihat areal peranan seorang wanita di dalam sebuah rumah tangga maka dapat di bagi menjadi, Peran Tradisional, Peran Transisi dan Peran Kontemporer. Sedangkan menurut (Astuti, 1998) dalam peran dan kebutuhan jender, peran wanita terbagi atas, Peran Produktif, Peran Reproduksi, Peran Sosial.

SDGs Gender

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.

METODE

Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research* dengan menggunakan jurnal, buku dan dokumen lainnya sebagai sumber penelitian.(Amnesti & Hakim, 2021) Pada penelitian studi pustaka lokasi pengumpulan data lebih luas bahkan dapat dikatakan tidak mengenal batas karena berhadapan langsung dengan teks dan angka.

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan literatur yang berasal dari bahan-bahan koheren dengan objek-objek pembahasan yang dimaksud (Arikunto, 2011). Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian pustaka ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai yaitu: Menentukan permasalahan, Menyusun kerangka pemikiran, Menyusun perangkat metodologi yang terdiri dari rangkaian metode-metode yang mencakup, Analisis data dan Interpretasi data (Bungin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

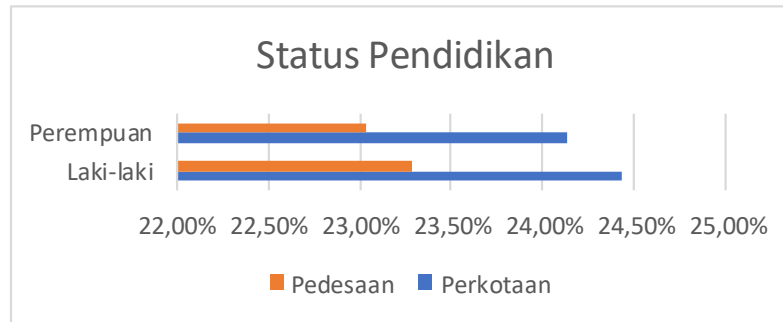
1. Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional

Peran perempuan mencakup berbagai hal yang penting. Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti Pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu perlu upaya kolaboratif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan perempuan untuk berkontribusi secara maksimal dalam segala aspek kehidupan. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan mendorong perubahan sikap pada masyarakat. Empat Sektor Utama Peran Perempuan melalui Pembangunan Nasional yakni pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi Angkatan Kerja dan Isu Kekerasan.

a) Bidang Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan memberikan akses yang setara untuk Pendidikan bagi perempuan. Hal ini dapat membuka peluang untuk karir dan kontribusi yang lebih besar dalam masyarakat. Selain itu pemerintah saat ini telah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 31 UUD Negara RI dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kebijakan tersebut tentu dapat meminimalisir kasus-kasus pernikahan pada usia dini yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus.

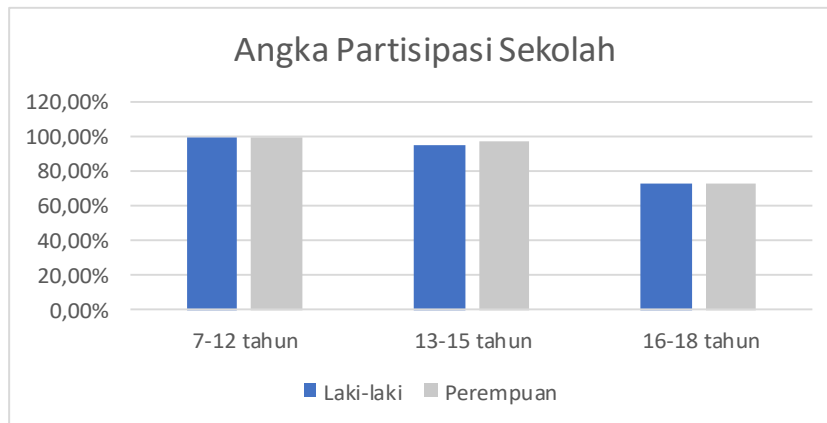
Pada umumnya, pemerintah telah memperhatikan peningkatan partisipasi perempuan dalam Pendidikan. Pada level dasar, perbandingan persentase penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah lebih tinggi dari pada penduduk perempuan baik di perkotaan maupun pedesaan. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram dibawah ini;



Gambar 1. Grafik Status Pendidikan Perkotaan dan Pedesaan

Sumber: Susenas 2021

Namun, pada level menengah dan tinggi, perempuan juga telah meningkatkan partisipasi mereka dalam Pendidikan, termasuk di universitas dan program-program Pendidikan tinggi lainnya. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram dibawah ini;



Gambar 2. Grafik Angka Partisipasi Sekolah

Sumber: Susenas 2021

Peningkatan partisipasi perempuan dalam Pendidikan merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Factor lain yang juga penting untuk dipertimbangkan termasuk akses Pendidikan yang berkualitas, kesetaraan akses untuk semua lapisan masyarakat, dukungan finansial, serta kendala sosial dan budaya yang menghambat partisipasi perempuan dalam Pendidikan.

Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Perempuan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2022

Tingkat Pendidikan								
SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
96,33	97,76	98,21	89,58	90,78	91,71	65,85	67,46	68,31

Sumber: Susenas KOR

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menyelesaikan Pendidikan mulai dari tingkat dasar, SMP dan SMA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan nasional dengan menyetarakan Pendidikan. Namun demikian, di kalangan masyarakat termasuk di Indonesia, perempuan seringkali berperan sebagai tulang punggung keluarga. Dengan mengoptimalkan peran di bidang Pendidikan, perempuan dapat bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk merawat anak-anak, mengurus rumah tangga, selain itu dalam beberapa kasus, perempuan juga menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga.

Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah meningkat di berbagai sektor, termasuk di sektor formal maupun informal. Hal ini mencerminkan peran penting perempuan dalam menyokong ekonomi keluarga. Beberapa fasilitas kesempatan pemerintah yang diberikan pada perempuan selain bidang yakni memberikan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan kepada perempuan khususnya bagi anak-anak dan keluarga miskin.

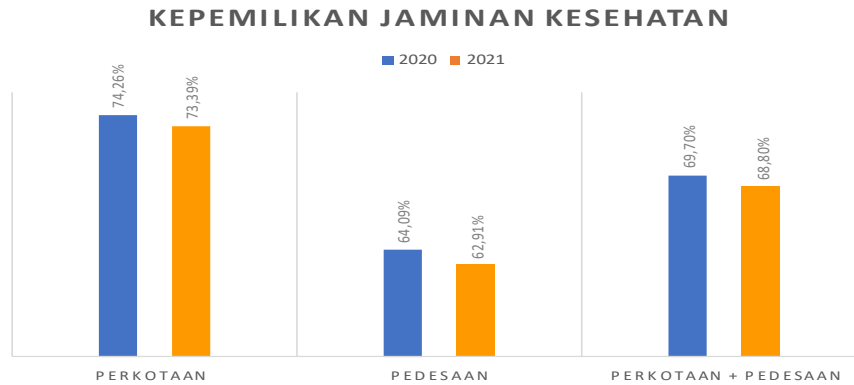
b) Bidang Kesehatan

Dalam hal ini pemerintah lebih berfokus memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak dan remaja. Perihal tersebut menjadi penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Di Indonesia, terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Beberapa aspek penting dari kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak meliputi:

- 1) Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan: Penting untuk memastikan bahwa ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak-anak memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan yang memadai.
- 2) Perawatan Antenatal dan Postnatal: Perawatan yang komprehensif sebelum dan setelah kelahiran sangat penting untuk memantau kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir.
- 3) Pelayanan Kesehatan Anak: Menyediakan vaksinasi, perawatan imunisasi, dan layanan kesehatan lainnya yang spesifik untuk anak-anak untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
- 4) Penyuluhan dan Edukasi: Memberikan informasi yang benar dan tepat kepada ibu dan keluarga tentang perawatan yang diperlukan untuk kesehatan ibu dan anak.
- 5) Fasilitas Kesehatan yang Memadai: Memiliki fasilitas yang memadai dengan peralatan medis yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
- 6) Tenaga Kesehatan yang Terlatih: Memiliki tenaga medis dan paramedis yang terlatih dengan baik untuk memberikan perawatan yang tepat dan memadai

Pada dasarnya peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk ibu dan anak juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi dan masyarakat. Jika dilihat dalam konteks perkotaan dan pedesaan, kepedulian penduduk perkotaan terhadap kesehatannya di masa depan lebih tinggi dibanding

dengan penduduk perdesaan. Hal ini ditandai dengan tingginya persentase kepemilikan jaminan kesehatan di perkotaan disbanding pedesaan. Di perkotaan, perempuan yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 74,26% sedangkan di pedesaan sebesar 64,09% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah perempuan yang memiliki Jaminan Kesehatan di Perkotaan sebesar 73,3% dan di pedesaan sebesar 62,91%. Lebih jelas dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 3. Grafik Persentase Perempuan menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Sumber: Susenas, 2020

Memastikan kepemilikan Jaminan Sosial bagi perempuan merupakan salah satu agenda SDG2 yaitu tujuan ke 3 dan ke 5. Hal ini tidak dapat tercapai apabila negara tidak bisa hambatan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan.

c) Bidang Ketenagakerjaan

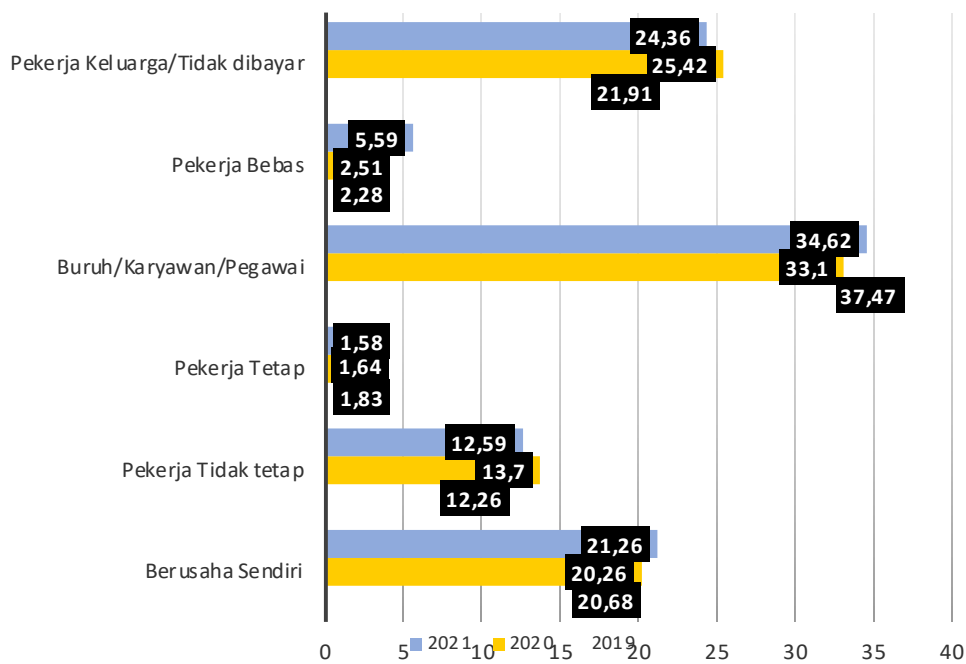
Peran perempuan di bidang ketenagakerjaan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, meskipun tantangan dan kesenjangan masih ada. Partisipasi dalam Angkatan Kerja merupakan hal penting peran perempuan dalam sektor ketenagakerjaan. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, baik di sektor formal maupun informal. Mereka memiliki peran vital dalam berbagai industri, mulai dari teknologi, pendidikan, kesehatan, hingga sektor jasa. Data umum menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Angkatan kerja telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir.

Hal tersebut disebabkan adanya dorongan dari berbagai factor yakni akses Pendidikan yang lebih baik telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh ketrampilan dan pengetahuan, adanya perubahan budaya dan sosial tentang peran perempuan dalam masyarakat yang telah membuka jalan bagi perempuan untuk mencari pekerjaan di luar rumah tangga, kemajuan teknologi dan globalisasi yang telah menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi perempuan terutama di sektor yang tergolong baru seperti teknologi informasi, layanan kesehatan dan sektor jasa. Selain itu kebutuhan ekonomi juga menjadi perihai dalam meningkatnya angka partisipasi kerja perempuan guna mendukung perekonomian keluarga.

Salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat yang setara dengan negara maju. Bidang ketenagakerjaan merupakan perihal yang menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya pembangunan nasional. Seiring berjalannya waktu berbagai pekerjaan dijalani oleh perempuan, mulai dari pekerja keluarga, menjadi buruh hingga berusaha sendiri. komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjaan menunjukkan sektor-sektor apa saja yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pekerja keluarga adalah pilihan bagi pekerja perempuan untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarganya serta tetap dapat melakukan aktivitas lainnya seperti mengurus rumah tangga. Status pekerja keluarga pada tahun 2019 mencapai 21,91% dan meningkat pada tahun 2020 yakni mencapai 25,42%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 mencapai 24,36%. Sedangkan perempuan yang status pekerjaannya berusaha sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni hingga mencapai 21,26% pada tahun 2021. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

Status Pekerjaan Utama



Gambar 4. Grafik Status Pekerjaan Perempuan

Sumber: Sakernas, 2019-2021

Tujuan pembangunan nasional saat ini yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan nasional yakni sektor ketenagakerjaan. Partisipasi perempuan di dunia kerja tidak hanya terbatas pada sektor formal saja melainkan juga pada sektor informal. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

Tabel 2. Pekerja Perempuan di Sektor Formal dan Informal

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Sektor Pekerjaan					
	Formal			Informal		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Perkotaan	51,56	45,54	46,68	48,44	54,46	53,32
Perdesaan	24,52	21,97	23,44	75,48	78,03	76,56
Perkotaan+Perdesaan	39,31	34,65	36,20	60,69	65,47	63,80

Sumber: Sakernas, 2019-2021

Data BPS pada tahun 2021 menunjukkan sektor informal masih tetap mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia baik di Perkotaan dan Perdesaan yakni sekitar 63,80% pekerja perempuan usia 15 tahun ke atas dan 36,20% bekerja pada sektor formal. Pada sebagian orang sektor informal merupakan penyelamat perekonomian. Hal tersebut dikarenakan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja lebih bersemangat. Bila ditinjau pada perbandingan daerah perkotaan dan pedesaan pada tahun 2021, jumlah pekerja formal di perkotaan sebesar 46,68% dan 23,44% di daerah pedesaan. Sedangkan pada sektor informal yakni sebesar 53,32% di daerah Perkotaan dan 76,56% di Perdesaan.

Banyaknya perempuan yang bekerja di sektor formal yakni karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat Pendidikan perempuan. Salah satu contoh pada sektor formal seringkali melihat kualifikasi Pendidikan. Persentase pekerja perempuan pada sektor formal berpendidikan tamat SD hanya 14,21%, sedangkan pada sektor informal sebesar 85,79%. Pada tamatan SMP jumlah pekerja perempuan mencapai 25,92% di sektor formal dan 74,08% di sektor informal. Sedangkan berbanding terbalik pada tamatan SMA ke atas pekerja perempuan pada sektor formal mencapai 67,33% dan di sektor informal hanya 40,06%. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Persentase Pekerja perempuan pada sektor formal dan informal berdasarkan status pendidikan

Status Pendidikan	Perempuan		Total
	Formal	Informal	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tamat SD Kebawah	14,21	85,79	100,00
SMP	25,92	74,08	100,00
SMA ke atas	67,33	40,06	100,00

Sumber: BPS RI – Sakernas, 2021

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa perempuan yang tamat Pendidikan SD ke bawah mendominasi pekerja di sektor informal. Hal ini disebabkan pekerjaan di sektor informal cenderung tidak menuntut ijazah di level tinggi. Sedangkan semakin tinggi Pendidikan perempuan, maka semakin besar peluang kerja di sektor

formal. Tahun 2021, 67,33% pekerja perempuan di sektor formal.

d) Isu Pencegahan Kekerasan

Peran perempuan dalam isu pencegahan kekerasan sangat penting dan multi-dimensi. Perempuan dapat berperan sebagai: Advokat dan Pelopor Kesetaraan: Perempuan sering menjadi penggerak utama dalam menyuarakan isu-isu kekerasan dan kesetaraan gender. Mereka berperan sebagai advokat yang kuat untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pendidik dan Pemimpin Masyarakat: Perempuan memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan, mengedukasi tentang tanda-tanda kekerasan, dan mempromosikan kesadaran akan hak asasi manusia.

Penggerak Sosial dan Pembangunan Komunitas: Perempuan sering terlibat dalam memimpin gerakan sosial, organisasi non-profit, dan kegiatan lokal yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan, serta membangun komunitas yang aman. Pengasuh dan Pelindung Keluarga: Perempuan sering berperan sebagai pengasuh utama dalam keluarga. Mereka memainkan peran kunci dalam melindungi anggota keluarga dari kekerasan dan dalam mendidik generasi mendatang tentang pentingnya menghormati dan melindungi satu sama lain. Pengambil Keputusan dalam Kebijakan Publik: Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat kebijakan dapat memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan. Ini termasuk partisipasi perempuan dalam forum-forum legislatif dan pengambilan keputusan di semua tingkat.

2. Peran Perempuan sebagai wujud Pencapaian SDGs

Dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDG's) yang telah disahkan pada tanggal 25 September 2015, yang berisi 17 tujuan dan 169 target dan merupakan rencana aksi global berlaku sejak tahun 2016 hingga 2030. Tujuan tersebut yakni mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Dalam SDGs dapat diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030. Pada dasarnya prinsip utama SDGs yaitu tidak meninggalkan siapapun atau *no one left behind*. Pentingnya kerja layak dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tujuan 8 dari SDGs yang memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan layak untuk masyarakat.

Berikut adalah beberapa cara di mana peran perempuan dapat menjadi wujud pencapaian SDGs: Kesehatan dan Kesejahteraan (SDG 3): Perempuan berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan kesehatan reproduksi yang baik bagi masyarakat. Pendidikan Berkualitas (SDG 4): Perempuan yang memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua. Pemberdayaan Ekonomi (SDG 8): Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kewirausahaan merupakan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Kesetaraan Gender (SDG 5): Peran perempuan sangat penting dalam mempromosikan kesetaraan gender, menghilangkan diskriminasi, dan memastikan pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan. Pemulihan Lingkungan (SDG 13, 14, 15): Perempuan memegang peran penting dalam keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan dampak perubahan iklim. Pencegahan Konflik dan Pembangunan Damai (SDG 16): Perempuan memainkan peran kunci dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, serta pengurangan kekerasan dan konflik di komunitas mereka. Inovasi dan Kemitraan (SDG 17): Partisipasi perempuan dalam inovasi, teknologi, dan kemitraan strategis adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Mengakui, mendukung, dan memperkuat peran perempuan dalam mencapai SDGs adalah langkah kunci menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya penting dalam mencapai tujuan-tujuan ini, tetapi juga merupakan investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi semua.

KESIMPULAN

Seiring berjalannya waktu sepak terjang perempuan di ruang publik mampu mengubah pandangan sebagai kelompok subordinat pada perempuan. Perempuan mampu membuktikan kepada publik bahwa mampu untuk menjalankan peran ganda. Tidak sedikit perempuan yang saat ini sukses dalam karirnya dan juga sukses menjadi ibu rumah tangga. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia diketahui mengalami kenaikan dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG yang mendekati 100 itu secara jelas mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam penelitian ini melihat berbagai peran perempuan dalam pencapaian SDGs melalui pembangunan nasional. Pada dasarnya SDGs dapat dimanfaatkan oleh perempuan sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender, selain itu SDGs juga dapat memperkuat Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan. Terdapat

Empat Sektor Utama Peran Perempuan melalui Pembangunan Nasional yakni pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi Angkatan Kerja dan Isu Kekerasan. beberapa cara di mana peran perempuan dapat menjadi wujud pencapaian SDGs yakni; Perempuan berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan kesehatan reproduksi yang baik bagi masyarakat; Perempuan yang memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua; Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kewirausahaan merupakan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; Peran perempuan sangat penting dalam mempromosikan kesetaraan gender, menghilangkan diskriminasi, dan memastikan pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan; Perempuan memegang peran penting dalam keberlanjutan lingkungan, termasuk dalam praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengurangan dampak perubahan iklim; Perempuan memainkan peran kunci dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, serta pengurangan kekerasan dan konflik di komunitas mereka; Partisipasi perempuan dalam inovasi, teknologi, dan kemitraan

strategis adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K. (2019). MENAJAMKAN PERSPEKTIF GENDER, MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Egalita*, 13(1), 24–40. <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8076>
- Amnesti, S. K. W., & Hakim, M. A. (2021). PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.14167>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev. V). Jakarta : Rineka Cipta.
- Astuti, M. (1998). *Peran dan Kebutuhan Gender*. Pustaka Pelajar.
- Aulia, R. (2018). Peran Perempuan dalam Organisasi Aisyiyah. *Holistic Al-Hadis*, 4(2), 67. <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i2.3227>
- Bungin, B. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (6th ed.). Bumi Aksara.
- Gomes, R. G., Rosabal, D., & Sanches, G. (2023). Durable transformation and structural changes for gender equality through PFMS and budgetary cycles : Using gender-responsive budgeting as a pathway to gender equality in PALOP-TL countries. In *DEVELOPMENT FUTURES SERIES WORKING PAPERS* (p. 24).
- Ikmal, N., Indriastuti, I., & Suprayoga, S. (2022). *Gender Equality and Women's Empowerment: Women's Participation In Era 4.0*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315556>
- Khairunnisa, I. N., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Journal of International Rela-Ons*, 8(5), 385–395.
- Kusnadi, K. (2001). *Perempuan Pesisir*. LKiS.
- Kusnadi, K. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan* (Cetakan 1 (ed.)). LKiS.
- Manembu, A. E. (2017). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–28.
- Mason, A. D., & King, E. M. . (2001). Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice. A World Bank policy research report. *The World Bank*.
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Indonesiatara.
- Nurlaili, N., & Muhartono, R. (2017). Peran Perempuan Nelayan Dalam Usaha Perikanan Tangkap Dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(2), 203. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v12i2.6481>
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development). *Natapraja*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i1.11957>